

POINTER

BAHAN RAPAT DENGAR PENDAPAT BERSAMA DPRD PROVINSI LAMPUNG

TAHUN ANGGARAN 2020

1. RENSTRA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTDA TAHUN 2019-2024

Didalam RPJMD tahun 2019-2024, Visi pembangunan Provinsi Lampung sesuai dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah **“Rakyat Lampung Berjaya”**. Dalam rangka mencapai Visi tersebut, maka misi pembangunan daerah Tahun 2019-2024 terdapat 6 misi, yang kemudian Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mengemban misi ke-2, yaitu **Mewujudkan "good governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.**

Didalam Renstra Sekretariat Daerah, yang notabennya merupakan turunan dari RPJMD Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2019-2024, Sekretariat Daerah Provinsi Lampung telah menetapkan beberapa **tujuan** yang mengacu dengan sasaran RPJMD Provinsi Lampung yang kemudian Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mengemban tujuan Sekretariat Daerah Provinsi lampung sebagai berikut : **Meningkatnya Peran Kebijakan Daerah untuk mewujudkan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan.** Dan **Sasaran** yang telah ditetapkan dalam perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut : **Meningkatnya Peran Kebijakan Daerah dalam peningkatan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah .**

Sedangkan didalam Agenda Kerja Utama Kepala Daerah 2019-2024, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mengemban Agenda Kerja Utama Kepala Daerah, yaitu : Reformasi Birokrasi dengan *agenda kerja utama* : Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan, APBD Rakyat Berjaya, Smart Village, Pendampingan Program Pembangunan Desa.

Tabel

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja

Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Peran Kebijakan Daerah dalam peningkatan Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah, dan Kerjasama Daereah guna Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah se-Provinsi Lampung.	Nilai (Skor) LPPD Provinsi Lampung Dalam Tingkat Nasional	2,95	2,97	2,98	2,99	3,00	3,05
			Persentase Peningkatan Fasilitas Penyelesaian Tapal Batas wilayah	12%	25%	45%	60%	83%	100%
			Persentase Pemanfaatan Kerjasama Daerah	100	100	100	100	100	100

Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

Tabel  
Indikator Kinerja Utama  
Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah, dan Kerjasama Daereah guna Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah se- Provinsi Lampung.	1. Nilai (Skor) LPPD Provinsi Lampung Dalam Tingkat Nasional	Nilai (skor)	Mencapai predikat yang maksimal (Sangat Tinggi), berarti Pemerintah Provinsi Lampung selaku penyelenggara urusan pemerintahan di daerah SANGAT BAIK dalam melaksanakan pemerintahan yang akuntabel berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik (Good Governance).	Skor Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri	Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
		2. Persentase Peningkatan Fasilitasi Penyelesaian Tapal Batas wilayah	Persen	Penyelesaian Tapal Batas Daerah merupakan salah satu issue Nasional yang di targetkan selesai pada tahun 2021. Di Provinsi Lampung ada 30 segmen batas. Sampai saat ini baru selesai 4 segmen (Permendagri).	Jumlah Tapal Batas Daerah yang selesai difasilitasi dibagi target penyelesaian Tapal Batas dikali 100 %	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		3. Persentase Pemanfaatan Kerjasama Daerah	Persen	Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan multi pihak sebagai dasar kolaborasi Tata Kelola Pemerintahan untuk mendukung pencapaian pembangunan lintas sektor di Provinsi Lampung.	Jumlah Kerjasama Daerah yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Kerjasama Daerah yang disepakati dikali 100 %	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Capaian Indikator Kinerja Utama  
Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Lampung Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Prestasi LPPD Meningkat dari kategori : Sangat Tinggi	Indeks	lebih dari 2.00 - 3.00	2,9261*	92,61
2	Persentase jumlah Proses Terfasilitasinya Pengganti Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten/ Kota Provinsi Lampung	%	100	100	100
3	Persentase Mou Kerjasama Antar Daerah	%	100	100	100

## II. Program Kegiatan dan Anggaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Tahun 2020 memiliki 2 Program dan 12 Kegiatan. Dengan pagu anggaran murni sebesar **Rp. 3.574.514.000,-** setelah dilakukan efisiensi pada Refocusing dan Realokasi Anggaran sebesar Rp. 2.101.338.040,- sehingga menjadi sebesar **Rp. 1.473.175.960,-** kemudian pada APBD Perubahan Biro Pemerintahan dan Otda mendapat tambahan sebesar Rp. 250.000.000,- sehingga APBD-P menjadi **Rp. 1.698.175.960,-** kemudian realisasi belanja sebesar **Rp. 1.521.512.183,-** sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 176.663.777,- atau sebesar 89,60 %

## III. Hasil/ Output Kegiatan

### 1. Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan

#### Daerah

- Penyusunan LKPJ
- Penyusunan LPPD
- Penyusunan Suplemen LPPD (IKK)

### 2. Penataan dan Monitoring Otda Urusan Konkuren Pemerintahan Daerah

Monitoring dan Evaluasi terhadap urusan Pilihan dan Wajib ke OPD Provinsi dan Kabupaten Kota Rincian Kegiatan : perjalanan dinas dalam rangka konsultasi, koordinasi, dan pembinaan Kabupaten/ Kota.

### 3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Menghimpun SPM yang sudah terbit pada bidang Pendidikan, Kesehatan, Ketertiban, PUPR dan Sosial di Provinsi Lampung dan Kab/ Kota.

### 4. Pembinaan dan Fasilitasi Penataan Daerah/Kecamatan

Terfasilitasi rencana pemekaran Kecamatan Umpu Semenguk Kab. Way Kanan dengan terbitnya kode dan data wilayah dengan noreg: 18.08.15 tanggal 31 Maret 2020.

### 5. Pembinaan dan Fasilitasi Pelaksanaan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

terfasilitasinya desa persiapan ke desa definitif, yaitu :

**Kabupaten Tulang Bawang Barat** : 7 Desa Persiapan ( Desa Gading Kencana, Desa Keagungan ratu Agung, Desa Karta Raya, desa Desa Karta Tanjung Selamat, Desa Sido Agung, desa Mekar Asri dan Desa Marga Asri).

**Kabupaten Pesawaran** : 4 Desa Persiapan (desa Kalirejo, Desa Dantar, Desa, grujugan Baru, Desa Pujodadi )

### 6. Fasilitasi Pelaksanaan Administrasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Fasilitasi pengangkatan, pemberhentian dan administrasi KDH/WKDH. Yang sudah dilaksanakan :

Pelantikan Bupati Mesuji, Bupati Lampung Selatan, Pelantikan Bupati Lampung Utara.

Pengukuhan Pjs. Bupati Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Way Kanan, Pesisir Barat dan Penyerahan Surat Plt. Bupati Pesawaran, Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kepala Daerah Se-Provinsi Lampung.

**7. Fasilitasi Proses Administrasi Anggota DPRD Provinsi dan Kab/Kota serta Kunjungan Kerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**

- Fasilitasi kunjungan kerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Yang sudah dilaksanakan fasilitasi Kunker Komisi II DPR RI, Ketua DPR RI, Ketua Komite DPD RI.
- Data Penggantian Antarwaktu DPRD Provinsi Lampung Tahun 2020, ada 14 (empat belas) Keputusan Menteri Dalam Negeri RI.
- Pemberhentian Anggota DPRD Kab/Kota se-Provinsi dan Pengangkatan Anggota DPRD Kab/Kota se-Provinsi Tahun 2020 dengan jumlah 8 orang

**8. Fasilitasi Pelaksanaan Kerjasama Antar Pemerintah Provinsi (APPSI), FKD-MPU dan Administrasi Kerjasama Luar Negeri**

Iuran kepada Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2018 Rp. 36 jt, Tahun 2019 Rp. 36 jt dan untuk tahun 2020 sebesar Rp 75 jt

Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) Tahun 2018 Rp. 25 jt, Tahun 2019 Rp. 25 jt dan untuk tahun 2020 sebesar Rp. 50 jt

Koordinasi, Rakergub untuk MUNAS APPSI Rincian Kegiatan : Rapat dan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi, koordinasi, dan pembinaan.

**9. Pembinaan dan Inventarisasi Penyelenggaraan Peran Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah**

Sosialisai Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Rapat koordinasi Setda Provinsi dengan Kab/Kota Se-Provinsi Lampung

Rapat Koordinasi OPD Pemerintah Provinsi Lampung.

**10. Pembinaan dan Fasilitasi Penataan Batas Daerah dan Inventarisasi Pertanahan (Toponimi)**

Fasilitasi penataan batas daerah terdapat 30 segmen :

**Terfasilitasi** sampai terbitnya Pemerndagri sebanyak 4 segmen yaitu Metro - Lamteng, Metro-Lamtim, Kab Way Kanan - Lampura, Kab. Tulang Bawang - Mesuji.

**Proses Permendagri** 5 segmen yaitu Kab Lambar-Pesibar, Kab Lamsel-Kab. Pesawaran, Kab Pesawaran-Kab. Tanggamus, Kab. Tanggamus-Kab. Pringsewu, Kab. Lambar-Kab Waykanan.

**Proses Penegasan** 21 segmen yaitu Kab. Tubaba - Way Kanan, Kab. Tulang Bawang-Tubaba, Kab. Pesawaran- Pringsewu, Kab. Lambar-Lamteng, Lambar-Lampura. Lamteng-Pringsewu, Kota Bandar Lampung-kab. Lamsel, Kota bandar Lampung-Pesawaran, Lamsel-Lamteng, Lamsel-Lamtim, Mesuji-Tubaba, Lamteng-Lamtim, Lamteng-Tanggamus, Lamteng-Tulang bawang, Tubaba-Lampura, Lambar-Tanggamus, Lamteng -Pesawaran, Tanggamus-Pesibar, Lamteng-Tubaba, Lamteng-Lampura, Lamtim-Tulang Bawang.

**11. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Capaian Keuangan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah**

Renstra (murni dan perubahan), Renja, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), RKA, DPA, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), Perjanjian Kinerja, Kinerja Pegawai (SKP), Evaluasi Jabatan Pegawai (Evjab), Daftar Urutan Kepegawai (DUK), Analisis Kepegawaian (Anjab), KP4, Budgeting Kepegawaian (Biodata Personal Pegawai/Data, Laporan Rekonsiliasi Aset / Barang.

**12. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah**

Rapat dan Perjalanan Dinas

**Capaian Realisasi Keuangan Tahun 2020**

No	Nama Program / Kegiatan	Anggaran	Realiasi	Persentasi
A.	Program Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah			
1	Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	124.969.800,-	124.575.800,-	99,68
2	Penataan & Monitoring Otda Urusan Konkuren Pemerintahan Daerah	6.285.000,-	6.050.200,-	96.26
3	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	61.926.000,-	57.061.200,-	92.14
4	Pembinaan dan Fasilitasi Penataan Daerah/Kecamatan	109.681.000,-	66.613.980,-	60.73
5	Pembinaan & Fasilitasi Pelaksanaan Adm. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kel	60.416.000,-	60.201.000,-	99.64
6	Fasilitasi Pelaksanaan Adm. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	278.486.200,-	203.822.400,-	73.19
7	Fasilitasi Proses Adm. Anggota DPRD Prov. dan Kab/Kota serta Kunjungan Kerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	60.511.300,-	57.055.300,-	94.29

8	Fasilitasi Pelaksanaan Kerjasama Antar Pemerintah Provisin Seluruh Indonesia (APPSI), FKD-MPU dan Adm. Kerjasama Luar Negeri	344.691.000,-	332.549.900,-	96.48
9	Pembinaan dan Inventarisasi Penyelenggaraan Peran Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	43.941.100,-	43. 814.300,-	99.72
10	Pembinaan dan Fasilitasi Penataan Batas Daerah dan Inventarisasi Pertanahan (Toponimi)	77.598.000,-	66.532.000,-	85.74
<b>B.</b>	<b>Program Pelayanan Adm. Perkantoran Biro Pemerintahan &amp; Otonomi Daerah</b>			
11	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Capaian Keuangan Biro	396.584.000,-	388.541.200,-	97.97
12	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Biro	133.086.560,-	114.694.903,-	86.18
<b>TOTAL</b>		<b>1.698.175.960,-</b>	<b>1.521.512.183,-</b>	<b>89. 60 %</b>

Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Nama Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Indikator	Realisasi	Realisasi
<b>A.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah</b>				
1	Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
2	Penataan & Monitoring Otda Urusan Konkuren Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Penataan Urusan Konkuren Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
3	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Penerapan SPM di Provinsi Lampung dan Kab/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
4	Pembinaan dan Fasilitasi Penataan Daerah/Kecamatan	Jumlah Dokumen Laporan hasil Pembinaan dan Fasilitasi Penataan Daerah/Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
5	Pembinaan & Fasilitasi Pelaksanaan Adm. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kel	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Keluarahan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
6	Fasilitasi Pelaksanaan Adm. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Laporan hasil Fasilitasi Pengangkatan, Pemberhentian dan Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan jumlah Laporan Koordinasi KDH se-Provinsi Lampung	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
7	Fasilitasi Proses Adm. Anggota DPRD Prov. dan Kab/Kota serta Kunjungan Kerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan hasil Fasilitasi Proses Administrasi Anggota DPRD Provinsi dan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

		Kab/Kota dan Dokumen Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Kerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			
8	Fasilitasi Pelaksanaan Kerjasama Antar Pemerintah Provisis Seluruh Indonesia (APPSI), FKD-MPU dan Adm. Kerjasama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dalam Forum APPSI, MPU dan Laporan Hasil Administrasi Kerjasama Luar Negeri.	2 Dokumen	1 Dokumen	50%
9	Pembinaan dan Inventarisasi Penyelenggaraan Peran Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pembinaan, Laporan Inventarisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan), dan Laporan Hasil Rapat Koordinasi Setda Prov dengan kab/kota se provinsi Lampung	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
10	Pembinaan dan Fasilitasi Penataan Batas Daerah dan Inventarisasi Pertanahan (Toponimi)	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pembinaan dan Fasilitasi Hasil Penataan Batas Daerah dan Inventarisasi Pertanahan (Toponimi)	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
B.	<b>Program Pelayanan Adm. Perkantoran Biro Pemerintahan &amp; Otonomi Daerah</b>	Persentase Dokumen Ketatausahaan yang tepat waktu			100%
11	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Capaian Keuangan Biro	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Capaian Keuangan	15 Dokumen	15 Dokumen	100%
12	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Biro	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	20 Kali	20 Kali	100%

**IV. HAMBATAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 1. Terjadinya revisi anggaran mengikuti dukungan kepada Pemerintah Pusat akibat terjadinya wabah Pandemi Covid.
- 2. Ketidaksesuaian antara Arus Kas pada beberapa kegiatan dengan Rencana Operasional Kegiatannya;
- 3. Kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang ada pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung.

**V. UPAYA-UPAYA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 1. Menunda Pelaksanaan Kegiatan dan Menggunakan Skala Prioritas
- 2. Hendaknya pihak yg berkompeten dapat mengadakan bimbingan teknis/pelatihan sehingga dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia khususnya bidang sekretariat.